

## ABSTRAKSI

Penulis skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penggunaan trotoar sebagai lahan parkir serta penegakan hukumnya di daerah kota Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana penegakan hukum dalam penggunaan fasilitas trotoar di kota Yogyakarta? serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyalahgunaan/alih fungsi trotoar?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu dengan melihat bagaimana praktek/implikasi aturan hukum dalam kenyataan. Data peneliti dikumpulkan dengan cara wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi pustaka berupa buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam penggunaan fasilitas trotoar di kota Yogyakarta, sanksi yang diberikandalampelanggaran kegiatan perparkiran hanya berupa teguran kepada pemilik kendaraan maupun kepada petugas/juruparkir. Pihak Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta jarang menjadi pihak yang disalahkan apabila terjadi pelanggaran di lapangan, karena pihak pemerintah daerah Kota Yogyakarta seolah-olah hanya bertugas mengurus pemungutan retribusi saja, tanpa mengawasi dan mengecek kegiatan perparkiran tersebut secara langsung di lapangan.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan/alih fungsi trotoar yaitu masih adanya pengelolaan parkir tanpa jindang tidak disiplin para petugas dan pengelola parkir juga kurang tertibnya dalam pengelolaan manajemen administrasi sehingga menghambat arus kerjasecara efisien dan masih terbatasnya lahan parkir sedangkan pengguna jasa yang makin meningkat sehingga parkir di tempat yang bukan seharusnya sehingga menghambat kelancaran lalu-lintas dan masih banyaknya pemungutan liar yang mana merugikan kedua belah pihak baik pemerintah daerah dan pengguna jasa parkir.

Penelitian ini merekomendasikan untuk pelaksanaan penegakan hukum penggunaan lahan parkir harus tegas dan sanksi yang digunakan harus benar-benar dilaksanakan karena agar adanya kepastian hukum ditubuh masyarakat dan aparatit sendiri, serta untuk meningkatkan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan penegakan hukum penggunaan lahan parkir sebaiknya kinerja aparat dinas perparkiran lebih ditingkatkan yaitu dengan membenahi semua yang ada di tubuh unit pelaksanaan teknis dinas perparkiran sendiri.